

GERAKAN DEMOKRASI KELOMPOK MARGINAL: PERLAWANAN NELAYAN PEREMPUAN TERHADAP REKLAMASI TELUK JAKARTA

Syauyid Alamsyah¹, Willy Purna Samadhi¹

¹Program Studi Magister Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Email: saidalamsyah22@gmail.com, willypurnasamadhi@upnvj.ac.id

*Korespondensi : willypurnasamadhi@upnvj.ac.id

(Submission 02-11-2023, Revisions 11-12-2023, Accepted 13-12-2023)

Abstract

Reclamation of Jakarta Bay is one of the controversial development issues in Jakarta in the 2016-2018 period. The debate that arises from the injustice of this development is a concern because it produces inequality that affects fishermen's access to marine resources that become livelihoods. The movement of fishermen's groups became a resistance by raising environmental issues and the influence of large economic interest groups in making public policy. This paper has a different focus, namely the impact of reclamation on the welfare of fishermen and especially fisherwomen. This issue is important to raise not only because of the consequences that fishermen can experience, but also because it shows the problem of democracy where the voices of marginalized groups are not taken into account in policy making. This research uses qualitative methods to look at the phenomena that occur and collect data from library studies and interviews to produce comprehensive findings. The findings in this research reveal the problem of community organizing capacity in consolidating social movements. The threat of disorganization within the women's movement, the ability to form networks and build a sustainable agenda still has weaknesses. Strengthening social movements is important to overcome because it can prevent the decline of democracy.

Keywords: *democracy; marginalized groups; fisherwomen; social movement.*

Abstrak

Reklamasi Teluk Jakarta merupakan salah satu isu pembangunan yang kontroversial di Jakarta dalam rentang waktu 2016-2018. Perdebatan yang muncul dari ketidakadilan pembangunan ini menjadi perhatian karena menghasilkan ketimpangan yang berpengaruh terhadap akses nelayan terhadap sumber daya laut yang menjadi mata pencaharian. Gerakan kelompok nelayan menjadi perlawanan dengan mengangkat isu lingkungan dan pengaruh kelompok kepentingan ekonomi besar dalam pembuatan kebijakan publik. Tulisan ini memiliki fokus yang berbeda, yaitu dampak reklamasi terhadap kesejahteraan nelayan dan khususnya perempuan nelayan. Isu ini penting diangkat bukan hanya karena konsekuensi yang bisa dialami nelayan, tetapi juga menunjukkan masalah demokrasi di mana suara kelompok marginal tidak diperhitungkan dalam pengambilan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam melihat fenomena yang terjadi dan pengumpulan data studi pustaka juga wawancara untuk menghasilkan temuan yang komprehensif. Temuan dalam penelitian ini mengungkapkan adanya masalah kapasitas pengorganisasian masyarakat dalam melakukan konsolidasi gerakan sosial. Ancaman disorganisasi di dalam tubuh gerakan perempuan, kemampuan dalam membentuk jaringan, dan membangun agenda berkelanjutan masih memiliki kelemahan. Penguatan gerakan sosial penting untuk diatasi karena dapat mencegah kemunduran demokrasi.

Kata Kunci: demokrasi; kelompok marginal; nelayan perempuan; gerakan sosial.

PENDAHULUAN

Gerakan masyarakat sipil dalam sebuah negara demokrasi menjadi sebuah kekuatan dalam proses memastikan terwujudnya kebijakan yang berasal dari keinginan masyarakat. Kekuatan dari gerakan masyarakat sipil selain sebagai alat memperjuangkan sebuah aspirasi, juga memainkan peranan penting dalam konteks demokrasi. Peranan penting tersebut ialah sebagai penyeimbang dari kekuatan pemerintah atau negara dalam sebuah pembangunan dan berjalannya suatu negara. Dalam

masyarakat sipil, terbentuknya sebuah gerakan dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan, ketidakadilan, dan perasaan termarginalkan oleh negara yang membuat terciptanya konflik sehingga masyarakat sipil dan negara mengambil posisi yang saling berhadap-hadapan.

Di Indonesia, gerakan masyarakat sipil menjadi kekuatan terdepan dalam mewujudkan demokrasi pasca kejatuhan rezim otoritarian yang dipimpin oleh Soeharto pada tahun 1998 yang kemudian juga menghasilkan reformasi hingga kini (Joash, dkk, 2017: 243 dalam Stokke, 2017). Kemudian, kekuatan rakyat atau *people power* di Filipina pada tahun 1986, juga berhasil menurunkan rezim Ferdinand Marcos dengan damai (Kompas, 2020).

Demokrasi diharapkan dapat menjadi sebuah jalan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan mengembalikan kedaulatan negara di tangan rakyat. Dalam pandangan Sartori, demokrasi adalah suatu sistem politik dimana pengaruh dari kelompok mayoritas dijamin oleh kelompok minoritas yang dipilih dan berkompetisi. Masyarakat hanya dapat mempercayakan kepada sistem politik yang berjalan. Rakyat secara struktur politik hanya mendapatkan posisi yang lebih lemah (Varma, 2010: 215-216).

Posisi masyarakat sipil masuk ke dalam kelompok mayoritas yang bergantung pada kelompok minoritas, yakni elite politik atau pemangku kebijakan. Mereka telah diberikan hak representasi atas aspirasi dari kelompok mayoritas, yaitu masyarakat sipil itu sendiri. Dalam permasalahan politik kontemporer inilah masyarakat sipil yang termasuk kelompok mayoritas memiliki posisi terpinggirkan atas apa yang menjadi aspirasinya. Oleh karena itu, gerakan masyarakat sipil menjadi jantung dalam demokrasi untuk menyeimbangkan kekuasaan dengan menolak keputusan ataupun kebijakan yang dianggap tidak berdasarkan kepentingan bersama.

Gerakan masyarakat sipil dalam demokrasi menjadi sebuah jalan dalam penolakan terhadap kekuasaan yang dianggap bersifat elitis, yang menyingkirkan partisipasi masyarakat di dalamnya. Di sini, peran dari “masyarakat sipil” dipahami sebagai sebuah mekanisme untuk pengambilan keputusan yang di dalamnya terdapat kesetaraan hak dari setiap kelompok masyarakat (Beetham, 2005: 36). Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa masyarakat sipil dalam demokrasi secara eksplisit merupakan bagian penting dalam pengambilan sebuah kebijakan ataupun keputusan dengan menekankan keterlibatan masyarakat dengan catatan harus terdapat persamaan hak untuk mencapai sebuah keputusan politik yang bersifat partisipatif.

Masyarakat sipil sebagai sebuah gerakan yang membawa kepentingan, memang seringkali dilemahkan oleh kepentingan elite dan pemilik modal yang akhirnya meminggirkan peran masyarakat itu sendiri. Padahal, demokrasi semestinya menjadi sebuah cara hidup (*a way of living*) yang berdasarkan pada apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Konflik kepentingan antara masyarakat, negara, dan pemilik modal menjadi dimensi yang terus saling berkaitan dalam masalah politik kontemporer. Ketidakmerataan pembangunan dan ketimpangan distribusi kekayaan sumber daya alam menghasilkan sebuah ketidakadilan yang memposisikan sebagian kelompok masyarakat termarginalkan.

Penelitian ini disusun sebagai pandangan kritis terhadap politik dan demokrasi kelompok nelayan perempuan di Jakarta yang mengalami dampak dari pembangunan reklamasi di Teluk Jakarta. Proyek reklamasi menghasilkan sebuah konflik multidimensi, terutama dalam isu kerusakan lingkungan dan marginalisasi terhadap kelompok nelayan, khususnya nelayan perempuan. Terkait isu pembangunan reklamasi terhadap nelayan yang menghasilkan konflik, sebenarnya tidak hanya terjadi di Jakarta saja. Di kota-kota lain di Asia Tenggara, isu tersebut juga muncul. Salah satunya proyek reklamasi seluas 300 hektar di Filipina, tepatnya di Teluk Manila. Proyek tersebut mendapatkan penolakan dari nelayan dan masyarakat pesisir.

Timbul kekhawatiran bahwa proyek itu mempengaruhi pendapatan dari mata pencaharian masyarakat sebagai nelayan serta menjadi ancaman bagi kehidupan kelompok nelayan, yaitu menurunnya hasil tangkapan secara signifikan. Pembangunan tersebut dinilai oleh nelayan setempat tidak akan menguntungkan apapun terhadap kelompok mereka. Dalam perencanaan, reklamasi tersebut diperuntukkan bagi rencana kawasan bisnis baru. Beberapa kelompok masyarakat melakukan perlawanan dengan meminta Mahkamah Agung pada tahun 2020 untuk mengeluarkan surat perintah yang melarang pembangunan Bandara dengan alasan lingkungan. Tetapi, pengadilan menolak permintaan tersebut (Mariejo & Thomson, 2023).

Di Malaysia, proyek reklamasi pesisir selatan Penang juga memicu polemik terhadap kelompok nelayan. Dalam pembangunan reklamasi tersebut, pemerintah Penang melakukan reklamasi untuk memecahkan permasalahan kenaikan populasi dan kebutuhan ruang. Reklamasi di pesisir barat Penang itu menempatkan pemerintah dan pengusaha dalam posisi berlawanan dengan penduduk dan nelayan. Menurut Mahadi selaku Direktur Asosiasi Nelayan Penang yang membawahi 6.000 anggota, area yang akan dilakukan reklamasi merupakan daerah yang kaya akan sumber daya ikan dan udang, sehingga pembangunan reklamasi akan menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan dan kerugian terhadap kelompok nelayan (DW, 2021).

Dalam sebuah pertemuan masyarakat sipil Asia Tenggara yaitu *ASEAN People Forum (APF)* tahun 2019 yang diselenggarakan di Thailand, hadir lebih dari 1000 peserta yang berasal dari berbagai gerakan masyarakat sipil dari negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Mereka melakukan diskusi guna merespon persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Asia Tenggara, dan salah satunya adalah soal pembangunan reklamasi yang begitu massif dilakukan. Salah satu organisasi masyarakat bernama Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), menyampaikan pentingnya perlindungan terhadap nelayan dan juga ekosistem tempat mereka mencari mata pencaharian.

Pembangunan reklamasi mengancam kelompok-kelompok nelayan akibat dari kegiatan ekstraktif dan eksploitatif. Perlindungan terhadap nelayan dan ekosistemnya sangat penting karena berdasarkan data dari *Food and Agriculture Organization (FAO)* tahun 2018, disebutkan bahwa negara-negara Asia Tenggara merupakan 10 besar produsen perikanan tangkap dunia. Asia Tenggara sendiri memiliki kawasan laut dengan 5.060.180 km persegi yang kaya sumberdaya perikanan. Hasil tangkapan di Indonesia mencapai 6.107.783 ton; Vietnam sebanyak 2.678.406 ton; Filipina sebanyak 1.865.213 ton; dan Malaysia sebanyak 1.574.443 ton (Kiara, 2019).

Di Indonesia pembangunan reklamasi dinilai tidak memerhatikan kepentingan dan perlindungan terhadap hak-hak nelayan. Ini menjadikan mereka sebagai kelompok yang dipinggirkan. Bukan hanya kehilangan mata pencaharian, pembangunan reklamasi juga berdampak pada kehilangan tempat tinggal. Ketidakadilan atas pembangunan yang dinilai strategis oleh pemangku kebijakan dan pemilik modal telah melanggar hak kelompok nelayan di pesisir laut Indonesia. Negara yang dijalankan di atas sistem demokrasi pada kenyataannya tidak dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan laporan akhir tahun KIARA di tahun 2016, kelompok nelayan yang menjadi korban terusir dari wilayah tempat tinggal mereka sebanyak 107.361 Kepala Keluarga (KK) akibat proyek reklamasi (Arimbi, 2017). Secara sosial dan politik, negara selaku pemerintah pusat dan daerah, seharusnya melindungi kelompok nelayan melalui kebijakannya. Namun, yang terlihat justru cenderung mementingkan pemilik modal sehingga menimbulkan ketidakadilan yang memicu konflik perlawanan dan gerakan masyarakat sipil. Salah satu proyek pembangunan reklamasi yang mendapatkan perlawanan dari masyarakat sipil yaitu pembangunan reklamasi yang sedang dikerjakan di daerah Teluk Jakarta. Pembangunan reklamasi dengan tujuan untuk melakukan pemekaran wilayah dalam memenuhi kebutuhan penduduk Jakarta, justru memicu perdebatan dan konflik.

Reklamasi yang dilakukan oleh pemerintah dinilai hanya menguntungkan pihak pemilik modal tanpa memerhatikan isu dan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Isu rusaknya lingkungan, peminggiran kelompok nelayan, dan juga kasus korupsi di dalam pembangunan reklamasi, menimbulkan reaksi yang saling menuntut dari masing-masing pihak yang berkepentingan.

Konflik terjadi ketika dua kelompok atau lebih memiliki perbedaan kepentingan dengan suatu tujuan (Robbins, 1998: 2). Konflik bisa terjadi karena adanya perbedaan dan ketidaksetaraan terhadap akses dari sumber daya (Stewart, 2008:3). Jika ditinjau apa yang menjadi akar dari konflik, ada beberapa aspek yang meliputi: perbedaan pengetahuan dan pemahaman, perbedaan nilai, perbedaan kepentingan, serta masalah pribadi atau latar belakang sejarah (Mitchel dkk, 2003). Kelompok nelayan perempuan di Jakarta menjadi salah satu kelompok yang mengalami perbedaan dan ketidaksetaraan terhadap akses sumber daya, yang merupakan akibat dari pembangunan reklamasi di Jakarta. Apalagi, rencananya ada 17 pulau reklamasi yang akan dibuat sepanjang Teluk Jakarta. Itu berarti sumber daya laut yang menjadi mata pencaharian keluarga-keluarga nelayan terganggu dan terdapat kerugian karena menurunnya pendapatan dari hasil tangkapan laut mereka.

Masyarakat nelayan, terutama kelompok nelayan perempuan di sekitar teluk Jakarta, menjadi kelompok yang terpinggirkan di tengah pembangunan reklamasi. Selain itu, pembangunan reklamasi yang akan dilakukan di sepanjang Teluk Jakarta diperkirakan akan mengancam pemukiman nelayan yang dihuni lebih dari 17.000 orang (Koalisi Pakar Interdisiplin, 2017: 18). Permasalahan sosial politik semakin mengerucut ketika pembangunan reklamasi tidak memperhatikan sisi ketidakadilan dan terganggunya ekonomi rumah tangga dari nelayan. Salah satu penelitian memperkirakan bahwa aktivitas perikanan yang akan terdampak langsung dari pembangunan reklamasi adalah perikanan payang, dogol, bubu dan gillnet serta budidaya kerang hijau. Selain itu, luas daerah penangkapan dan budidaya kerang hijau (*perna viridis*) juga akan terdampak langsung dari kegiatan reklamasi yang luasnya mencapai 1.527,34 ha (Sampono 2013: 73).



Sumber: Pergub DKI Jakarta 246/2014

Besarnya perubahan daerah penangkapan ikan, hilangnya lokasi budidaya kerang hijau, gangguan terhadap jalur perahu nelayan dan penurunan kualitas sumber daya ikan inilah yang menjadikan pembangunan reklamasi memicu perlawanan dari kelompok-kelompok nelayan, dan salah satunya kelompok nelayan perempuan. Kelompok nelayan perempuan yang terpinggirkan secara sosial, ekonomi, dan politik akibat ketidaksetaraan terhadap akses sumberdaya, melakukan perlawanan dengan menyatukan jaringan-jaringan sosialnya melalui koalisi dan gerakan masyarakat untuk mempertahankan hak atas kehidupan pasca reklamasi terjadi.

Ketidakpuasan terhadap kebijakan pembangunan yang diputuskan pemerintah dan situasi politik yang demokratis membuka peluang bagi kelompok nelayan perempuan untuk menyuarakan kesulitan yang mereka hadapi untuk dapat mengubah kebijakan yang telah diambil. Demokrasi diharapkan menjadi jembatan untuk menerima partisipasi warga negara. Melalui perjuangan ini, diharapkan terdapat pengakuan politik adanya ketidakadilan yang menimpa kelompok nelayan perempuan, serta adanya perhatian untuk meninjau kembali pengambilan keputusan sehingga keputusan tersebut lebih berdasarkan pada partisipatoris akar rumput, yang salah satunya adalah kelompok nelayan perempuan.

Melalui demokrasi yang menyediakan ruang dan peluang politik, kelompok nelayan perempuan berharap dapat memanfaatkan situasi politik yang demokratis untuk memperjuangkan kepentingan melalui identitas kolektif membangun jaringan gerakan sosial. Riset ini secara mendalam ingin melihat apa yang dilakukan oleh kelompok nelayan perempuan melalui gerakan sosial dalam situasi demokrasi saat ini serta tantangan apa yang mereka hadapi dalam mewujudkan tujuan gerakan mereka tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada fenomena yang dikaitkan dengan teori empiris sehingga menghasilkan sebuah analisis yang komprehensif. Metode penelitian ini dinilai dapat mengkaji fenomena dari studi kasus gerakan nelayan terhadap pembangunan reklamasi di Teluk Jakarta. Menurut Bogdan dan Biklen, penelitian kualitatif

dikenal dengan penelitian fenomenologis karena penelitian ini dilakukan pada kondisi alamiah yang dapat melihat suatu permasalahan di masyarakat (Alaslan, 2021: 21).

Penelitian ini menggunakan studi pustaka. Studi pustaka sangat berperan untuk membentuk suatu kerangka berfikir di dalam penelitian (Nazir, 1988). *Literature review* menjadi cara untuk mencari sumber data dengan pengumpulan referensi yang kemudian digunakan untuk melakukan analisis penelitian. Sumber data berasal dari laporan-laporan di lapangan oleh organisasi masyarakat seperti Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), artikel, buku, sumber berita, website, dan juga laporan dari koalisi interdisiplin yang relevan kaitannya di lapangan.

Penelitian ini juga menggunakan wawancara terhadap Sekertaris Jenderal KIARA, Susan Herawati, dengan tujuan melakukan validasi dari laporan-laporan yang digunakan pada studi pustaka dan juga mendapatkan data yang lebih komprehensif terkait gerakan perlawanan nelayan di Teluk Jakarta yang menolak pembangunan reklamasi. Esterberg dalam Alaslan (2021:77), mendefinisikan wawancara adalah metode yang digunakan untuk melakukan pengumpulan informasi melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan datanya dalam suatu topik pembahasan yang diteliti. Studi Pustaka dan wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai cara untuk mendapatkan data yang mendalam agar dapat mendukung analisis yang kritis.

PEMBAHASAN

• Teori Gerakan Sosial

Gerakan sosial dalam pandangan Sidney Tarrow, merupakan suatu tantangan kolektif yang berdasarkan pada tujuan bersama kolektif, rasa solidaritas sosial, interaksi sosial yang berkelanjutan antara para elite, penentang, dan pemegang wewenang. Hal ini membuat gerakan sosial menjadi sumber dari harapan (*source hope*) (Tarrow, 2011: 9). Gerakan sosial merupakan satu bentuk dari ragam politik perlawanan (*contentious politics*). Wujud dari perlawanan, misalnya unjuk rasa, pemogokan, terorisme, pemberontakan, atau revolusi. Terdapat empat kerangka dalam teori gerakan sosial, yaitu tantangan kolektif, tujuan bersama, dan interaksi yang berkelanjutan.

Gerakan sosial (*social movement*) sebagai bentuk tindakan kolektif mengacu pada individu-individu yang berkontribusi sumber daya untuk mencapai kepentingan bersama, yaitu tujuan yang tidak bisa dicapai secara sendiri-sendiri oleh setiap individu. Tidak semua tindakan kolektif dapat dikategorikan sebagai gerakan sosial. Dalam pencapaian tujuan bersama tidak selalu identik dengan gerakan sosial. Gerakan sosial terdiri dari beberapa unsur seperti: jaringan informal; kepercayaan dan solidaritas bersama yang memobilisasi; isu-isu yang konfliktual; dan seringnya penggunaan berbagai macam bentuk protes (Della Porta dan Diani, 2006: 18).

Gerakan sosial adalah jaringan interaksi antara berbagai faktor yang berbeda, yang dapat mencakup organisasi-organisasi formal ataupun tidak, tergantung pada keadaan-keadaan yang berubah. Oleh karena itu, suatu organisasi tunggal, walaupun memiliki karakteristik gerakan yang dominan, bukanlah dapat disebut gerakan sosial. Organisasi dan gerakan sosial bukanlah sesuatu yang identik karena mereka merefleksikan pengorganisasian (Della Porta dan Diani, 2004: 16).

Jaringan informal yang kuat membedakan proses gerakan sosial dengan bentuk-bentuk lain dari tindakan kolektif yang sering dilakukan dalam ruang lingkup suatu organisasi yang spesifik. Dalam proses gerakan sosial, baik aktor-aktor individu maupun aktor-aktor yang terorganisasi, tetap mempertahankan otonomi dan kebebasannya. Mereka terus berperan dalam pertukaran sumber daya dengan tujuan mencapai tujuan bersama. Koordinasi kegiatan, aturan-aturan tentang perilaku individu dalam gerakan, dan penyusunan strategi, semuanya tergantung pada negosiasi-negosiasi antara individu-individu dan organisasi-organisasi yang terlibat dalam tindakan kolektif. Tidak ada satu organisasi pun, sebesar apapun kuatnya organisasi tersebut, dapat mengklaim mewakili suatu gerakan secara keseluruhan. Dalam gerakan sosial, kesempatan akan tersedia bagi individu yang berkomitmen tinggi dan terampil untuk memainkan peran yang independen dalam proses politik (Della Porta dan Diani, 2006: 21).

Teori gerakan sosial merupakan upaya sintesis dari dua teoritis yang saling bertentangan, antara strukturalis dan pilihan rasional. Para teoritis strukturalis melihat sebuah aksi kolektif perlawanan (*contentious collective actions*) sebagai akibat dari perubahan-perubahan dalam sistem negara. Sedangkan teoritis pilihan rasional berpandangan bahwa akar dari politik perlawanan merupakan puncak kumpulan tindakan-tindakan individu. Menurut pendekatan ini perubahan

struktural dipahami sebagai opsi bagi individu. Kesempatan politik dalam teori gerakan sosial diadopsi dari argumen para pemikir strukturalis. Sehingga secara struktural, gerakan sosial muncul ketika terjadi perubahan kondisi struktur politik yang membuka kesempatan bagi para demonstran untuk melaksanakan gerakan yang tujuannya mengubah keadaan. Gerakan sosial adalah cara yang ditempuh oleh orang-orang yang tidak memiliki akses terhadap lembaga negara, bertindak atas nama kelompok masyarakat dalam menentang pemerintah atau melawan (Tarrow, 2011: 28-29).

Studi tentang gerakan sosial telah difokuskan terutama pada variasi progresifnya, yang menunjukkan potensi emansipatorisnya. Pada permulaan studi gerakan sosial, penelitian tentang perilaku kolektif menekankan bahwa fenomena kolektif tidak hanya mencerminkan krisis sosial, tetapi juga menghasilkan solidaritas dan norma-norma baru, yang berfungsi sebagai pendorong perubahan, terutama dalam sistem nilai. Para pengkaji perilaku kolektif mengacu pada interpretasi ini dalam melihat gerakan sosial pada saat-saat perubahan sosial yang intens (Blumer 1951; Gusfield 1963; Turner dan Killian 1987 dalam Della Porta dan Diani, 2020:10).

Berdasarkan konsep teoritik dapat dipahami bahwa gerakan perlawanan nelayan perempuan adalah bentuk dari aksi kolektif perempuan nelayan di pesisir utara Jakarta yang menganggap bahwa yang mereka lakukan adalah bentuk gerakan untuk melakukan perubahan dan mereka bagian dari perubahan tersebut dengan gerakan perlawanan. Hal ini dilengkapi dengan argumentasi organisasi dan individu yang terlibat dalam aksi kolektif tidak lagi hanya mengejar tujuan, tetapi meleburkan diri mereka sebagai bagian dari proses perubahan yang jauh lebih besar atau perlawanan terhadap perubahan (Della Porta dan Diani, 2006: 22).

Gerakan sosial yang dilakukan kelompok nelayan memanfaatkan arena demokrasi untuk membawa tuntutan dan aspirasi. Disebut sebagai gerakan demokrasi karena gerakan ini adalah bentuk dari keaktifan masyarakat sipil untuk meminta proses deliberasi yang dihilangkan. Argumentasi tersebut sepadan dengan definisi yang menyatakan bahwa gerakan demokrasi adalah posisi terbaik untuk membangun ruang-ruang deliberatif yang dapat mengawasi secara kritis lembaga-lembaga publik (Jane, 1996).

• **Gerakan Nelayan Perempuan Sebagai Bentuk Demokrasi Dan Perlawanan Atas Pembangunan Reklamasi Jakarta yang Memarginalkan**

Gerakan perlawanan nelayan perempuan di Jakarta terdiri dari perempuan yang berprofesi sebagai nelayan dari pra-produksi hingga pasca-produksi. Gerakan ini muncul ketika pembangunan reklamasi memberikan dampak sosial, ekonomi, lingkungan, dan kesehatan yang secara langsung dirasakan oleh perempuan. Gerakan nelayan perempuan ini tergabung dalam sebuah “Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ)” yang berjuang untuk membatalkan proyek reklamasi. Mereka mendeklarasikan diri dan membawa tuntutan bahwa perempuan dan masyarakat hanya menjadi penonton dan kemudian terpinggirkan dari pembangunan yang tidak berkelanjutan dan patriarkis (KIARA, 2015).

KSTJ terdiri dari Komunitas Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), LBH Jakarta, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Wahana Lingkungan (WALHI). Ada empat tuntutan KSTJ dalam bergerak, yaitu: 1) Mencabut seluruh izin reklamasi 17 pulau tanpa kecuali termasuk empat pulau yang sudah terbangun; 2) Mencabut izin usaha pelaksanaan reklamasi; 3) Membongkar empat pulau yang sudah dibangun; serta 4) Memulihkan ekosistem pesisir dan Teluk Jakarta dengan membentuk tim yang terdiri dari unsur masyarakat, pemerintah, dan pakar (VOA, 2018).

Negara, pemilik modal, dan kelompok nelayan perempuan berada pada pusing konflik atas pembangunan reklamasi di Teluk Jakarta yang dinilai mengesampingkan dampaknya terhadap masyarakat pesisir yang mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan. Pembangunan reklamasi untuk kepentingan ekonomi dan memperluas ruang publik yang dapat menampung kepadatan penduduk Jakarta menjadi rasionalisasi mengapa hal tersebut penting untuk dilakukan. Sementara, aspek rusaknya ekosistem yang berdampak langsung pada nelayan perempuan dan anak-anak di pesisir Jakarta menjadi hal yang terpinggirkan.

Pembangunan reklamasi terus mendapatkan legitimasi di tengah dampak yang begitu berlapis dirasakan oleh perempuan dan anak-anak. Mereka, kelompok nelayan perempuan dan anak-anak di pesisir terus dihadapkan oleh kerusakan ekosistem laut akibat pembangunan reklamasi. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Susan Herawati sebagai Sekertaris Jenderal Koalisi Rakyat

untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dijelaskan bahwa, nelayan perempuan memiliki relasi yang sangat dekat dengan alam dan ekosistemnya, kesehatan lingkungan atau rusaknya lingkungan akan berdampak pada tubuhnya dan itu yang tidak dipikirkan oleh aktor-aktor negara dan pemilik modal. Mereka tidak mengerti bahwa tubuh perempuan dan keputusan politik ataupun pembangunan yang merusak laut itu juga mempengaruhi kesehatan perempuan dan anak-anak.

Menurut Susan Herawati, akibat dari pembangunan reklamasi, keluarga-keluarga nelayan sering dihadapkan banjir rob yang sering merendam tubuh perempuan dan anak-anak. Secara fisiologis, perempuan memiliki siklus menstruasi. Betapa sangat tidak nyamannya mereka ketika sedang siklus menstruasi dan terendam banjir rob akibat kerusakan lingkungan dan laut karena pembangunan yang tidak memperhatikan tubuh perempuan.

Gerakan nelayan perempuan menjadi bentuk perlawanan atas ketidakadilan yang menimpa keluarga-keluarga nelayan sepanjang Teluk Jakarta. Kelompok nelayan perempuan menjadi entitas kelompok yang sangat terpinggirkan dibandingkan nelayan laki-laki. Nelayan perempuan masih menjadi kelompok terdiskriminasi, padahal perannya sangat penting dalam perikanan. Susan Herawati menjelaskan bahwa, seharusnya negara tidak boleh lalai terhadap kelompok nelayan perempuan, karena peran perempuan sangat penting dalam rantai perikanan.

Dalam konsitusi, kelompok nelayan pun sudah termarginalkan. Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam, dijelaskan bahwa nelayan adalah setiap orang yang melakukan aktivitas mata pencaharian melakukan penangkapan ikan. Akan tetapi, perempuan yang berprofesi nelayan sulit sekali diterima oleh budaya, agama, maupun pemerintah. Profesi nelayan dalam pandangan budaya, adalah pekerjaan milik laki-laki. Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan reklamasi Jakarta, nelayan perempuan sulit mendapatkan hak-haknya dan keadilan yang telah dirampas aktor-aktor negara dan pemilik modal.

Perlawanan kelompok nelayan perempuan yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta adalah bentuk atas hak demokrasi masyarakat untuk memperjuangkan dan mempertahankan kepentingannya. Susan Herawati mengatakan bahwa, perlawanan perempuan adalah bentuk mempertahankan ruang yang dimiliki perempuan dan anak-anak nelayan yang sangat terbatas tetapi juga ikut dirampas. Perlawanan perempuan terhadap negara dan pemilik modal bukan hanya tentang kerugian ekonomi, kesehatan, dan penggusuran tetapi mereka juga menyelamatkan masa depan anak-anaknya. Kelompok nelayan berpikir jauh lebih progresif dan kritis, akan tetapi ruangnya tidak seadil dengan ruang yang diberikan terhadap laki-laki.

Puspa Dewi, Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan mengatakan bahwa gerakan nelayan perempuan menjadi inisiasi gerakan masyarakat yang berusaha menggugat proyek reklamasi. Pembangunan tersebut mengancam perempuan dan keberpihakan penguasa terhadap kepentingan pengusaha. Menurunnya penghasilan akibat privatisasi laut di kawasan reklamasi membuat keluarga-keluarga nelayan terhimpit secara ekonomi. Dimana hal tersebut menjadi dasar atas perlawanan untuk menolak reklamasi karena telah menindas dan memiskinkan perempuan. Beralih profesinya nelayan akibat reklamasi juga berdampak pada terganggunya kedaulatan pangan. Efek panjang tersebut yang diperjuangkan oleh kelompok nelayan perempuan (Ega Melindo, 2016).

Ini yang dijelaskan Sidney Tarrow, bahwa gerakan sosial merupakan satu bentuk dari ragam politik perlawanan (*contentious politics*). Perlawanan politik yang terjadi melalui gerakan nelayan perempuan dianalisis sebagai bentuk dari permasalahan yang mengakar, yakni ketidakadilan pembangunan dan akses sumber daya laut yang terbatas akibat pembangunan. Gerakan sosial terjadi sebagai bentuk mereka melihat demokrasi sebagai pintu untuk membawa kepentingan mereka dengan membentuk konsensus dan dukungan. Mereka berharap bahwa gerakan sosial dan demokrasi dapat menjadi jalan untuk mengubah keadaan. Adapun fokus penelitian ini adalah melihat bagaimana kelompok nelayan perempuan itu bergerak melalui gerakan sosial dan peluang demokrasi yang dapat mereka manfaatkan untuk dapat mencapai tujuan kolektifnya.

- **Analisis Perlawanan Gerakan Nelayan Perempuan Terhadap Reklamasi**

Kesempatan politik dalam gerakan sosial yang dilakukan nelayan perempuan muncul ketika terjadi perubahan atas keputusan politik yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam akses sumber daya yang membuka kesempatan untuk melaksanakan gerakan yang tujuannya

mengubah keadaan. Gerakan sosial menjadi sebuah cara yang ditempuh oleh orang-orang yang tidak memiliki akses terhadap lembaga negara, bertindak atas nama kelompok masyarakat dalam menentang pemerintah atau melawan. Nelayan perempuan yang bergerak dalam menentang reklamasi Teluk Jakarta merupakan istri-istri dari nelayan yang secara ekonomi sebelum pembangunan reklamasi tidak tergolong sejahtera tetapi akibat pembangunan reklamasi, pendapatan ekonomi yang sangat terbatas dengan kebutuhan sehari-hari berkurang drastis. Dalam kondisi tersebut, keadilan gender terhadap nelayan perempuan menjadi tidak setara. Mereka harus menanggung beban ganda ketika suami mereka yang tidak melaut, tidak bisa memperoleh sumber pendapatan lain.

Nelayan perempuan yang bergerak tergabung dalam sebuah koalisi besar yang dinamakan “Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta”. Koalisi tersebut terdiri dari beberapa kelompok organisasi masyarakat. Koalisi tersebut bergerak setelah melihat bahwa pembangunan reklamasi menyalahi regulasi seperti prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan mengenai reklamasi, yaitu dengan tidak mendasarkan kepada Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kemudian tidak adanya izin lokasi, tidak ada izin lokasi pengambilan material, tidak adanya rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan untuk pelaksanaan reklamasi, tidak adanya pengumuman permohonan izin lingkungan, tidak ada pengumuman Izin Lingkungan, tidak adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang mendasari terbitnya Objek Sengketa, tidak adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) secara kawasan, terpadu dan terintegrasi dalam kawasan Teluk Jakarta, tidak ada Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di daerah pengambilan material reklamasi, tidak adanya memasukkan berbagai peraturan perundang-undangan dalam pertimbangan yuridis dalam mengeluarkan objek sengketa (Siaran Pers Kiara, 2017).

Menurut Koalisi Pakar Interdisiplin (2017:25), pokok utama dari pembangunan wilayah pesisir haruslah berbasis kepada partisipasi publik, kearifan lokal yang bertujuan untuk menyejahterakan nelayan. Hak-hak bekerja para nelayan ini harus diutamakan dari hak untuk berinvestasi. Tiadanya pengakuan terhadap nelayan perempuan berimplikasi pada ketiadaan perlindungan dan terkecualikannya perempuan dari berbagai program ataupun kebijakan. Perempuan juga tidak dilibatkan dan tidak diperhitungkan situasinya dalam proses-proses pengambilan keputusan ataupun perumusan kebijakan yang terkait dengan kelautan dan perikanan, karena dianggap sudah cukup terwakili oleh suami sebagai kepala keluarga. Termasuk ketika proyek reklamasi berjalan. Tidak ada analisis (potensi) dampak yang berbeda antara laki-laki dan perempuan di wilayah pesisir sebelum izin proyek reklamasi dikeluarkan. Perempuan juga tidak pernah diinformasikan mengenai rencana dijalkannya proyek reklamasi. Reklamasi juga telah mengakibatkan hilangnya wilayah tangkap nelayan tradisional karena pencemaran yang terjadi.

Nelayan perempuan dijauhkan secara paksa dari sumber daya laut yang digeluti sebagai sumber kehidupannya. Ketika itu terjadi, maka penolakan terhadap reklamasi menjadi sebuah keniscayaan. Penelitian ini menganalisis bahwa inilah yang menjadi dasar bergeraknya nelayan perempuan tersebut. Setelah dasar dari mereka bergerak terbentuk, kemudian muncul pertanyaan bagaimana mereka bergerak dengan membangun konsolidasi dan jaringan?

Seperti yang dijelaskan Della Porta bahwa tahap pembentukan dan konsolidasi, perasaan bersama secara kolektif berhubungan dengan solidaritas dan loyalitas yang dapat terjadi diantara individu-individu dan kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi tertentu. Perasaan bersama yang dirasakan secara kolektif atas pembangunan reklamasi yang menyingkirkan keadilan atas hak-hak dan dampaknya terhadap nelayan perempuan menjadi sebuah dasar mereka melakukan konsolidasi yang terbentuk untuk menentang dan melawan reklamasi.

• **Tantangan Kolektif**

Susan Herawati menjelaskan bahwa tantangan dalam membangun konsolidasi dari gerakan perempuan nelayan adalah membangun percaya diri dari masing-masing individu dari nelayan perempuan. Ini menjadi dasar yang sulit karena ada kultur budaya yang selama ini membatasi mereka untuk berpikir secara kritis dan berani bersuara. Dalam sebuah budaya patriarki yang terkonstruksi, aspirasi dari kesusahan dan kesulitan yang dihadapi keluarga nelayan cukup diwakilkan oleh kepala keluarga, yaitu laki-laki yang menjadi suami dari nelayan perempuan.

Untuk membuat bergeraknya perempuan, adalah dengan melepaskan mereka dari belenggu patriarki, bahwa mereka juga memiliki ruang yang setara untuk menentang dan melawan dari

ketidakadilan yang baik di ruang domestik maupun publik. Hal ini juga ditemukan pada penelitian terhadap perempuan nelayan di reklamasi Teluk Kendari, dimana perempuan tidak pernah dilibatkan ataupun diundang secara langsung pada rapat-rapat pengambilan keputusan mulai dari dalam rumah, maupun di ranah publik (Sarni dan Masthuriyah, 2017: 14). Selain itu, akses pemberdayaan nelayan maupun perlindungan masih sangat terbatas (Koalisi Pakar Interdisiplin, 2017: 22).

Konstruksi sosial yang terbangun dengan adanya pembatasan terhadap perempuan menjadi alasan di balik pertanyaan tentang mengapa sulit membangun konsolidasi gerakan perempuan nelayan. Selama ini, suara perempuan diwakili oleh kepala keluarga yang membuat suatu kondisi sosiologis dominasi patriarki membungkam suara perempuan. Kemudian, beban ganda juga terjadi dimana istri-istri nelayan yang terdampak penghasilannya karena pembangunan reklamasi, ikut membantu perekonomian dengan bekerja serabutan. Rata-rata kontribusi wanita nelayan terhadap pendapatan keluarga nelayan di Muara Angke adalah sebesar 30,25% (Krishna, dkk, 2016: 89). Ini menjadi faktor, ketika kelompok-kelompok masyarakat bergerak untuk mengajak seluruh lapisan nelayan, dan nelayan perempuan memiliki tantangan tersendiri yang begitu kompleks. Terlebih faktor ekonomi nelayan perempuan Jakarta ikut membatasi ruang gerak untuk mengikuti konsolidasi karena harus memikirkan urusan domestik rumah tangga. Padahal, perjuangan nelayan perempuan dalam menolak pembangunan reklamasi sangat penting sejalan dengan peran perempuan dalam proses perikanan

Faktor geografis juga ikut mempengaruhi dan menjadi sebuah tantangan lainnya. Berdasarkan pengalaman dalam membangun konsolidasi, masyarakat perkotaan atau urban lebih sulit dalam membentuk jaringan terutama kelompok nelayan perempuannya. Hal tersebut karena mereka memiliki sifat individualisme yang tinggi. Sifat individualisme yang tinggi inilah menjadi tantangan dalam membentuk kelompok jaringan dibandingkan dengan nelayan-nelayan di daerah pedesaan atau rural yang memiliki sifat militan dan berkelompok. Itu mengapa bahwa kondisi geografis juga ikut mempengaruhi pola dari perlawanan kelompok nelayan perempuan. Kondisi Jakarta yang beragam dan multikulturalisme membuat proses konsolidasi berjalan lambat karena bukan dari daerah yang sama, tingginya heterogenitas tersebut membuat konsolidasi berjalan sulit.

Rasa tidak percaya yang tinggi menjadi faktor selanjutnya. Hal ini karena sejarah panjang dari pemukiman nelayan di Jakarta yang terus mengalami penggusuran berulang kali. Ketika hal tersebut terulang, yakni dengan pembangunan reklamasi, rasa tidak percaya dari keluarga nelayan terhadap kelompok lain yang peduli dan ingin membentuk jaringan mendapatkan respon yang antipati. Keluarga-keluarga nelayan kecil tradisional tersebut pernah mengalami dan mewarisi ingatan penggusuran paksa dari generasi ke generasi, dari 1960-an hingga 2000-an. Mulai dari penggusuran Ancol di akhir 1960-an, lalu mereka pergi ke barat ke Muara Karang. Tahun 1977, ada dua momen besar yang menandai kepindahan mereka jauh lebih ke barat ke Muara Angke, yaitu pembangunan pembangkit listrik di Muara Karang yang berujung ke penggusuran, dan peresmian Muara Angke sebagai pusat perikanan tradisional Jakarta (Alfian dan Alfi, 2023).

- **Tujuan Bersama**

Dalam sebuah perlawanan politik, Sidney Tarrow mengingatkan bahwa orang-orang tidak mempertaruhkan hal yang kecil dalam politik yang penuh perdebatan kecuali mereka memiliki alasan yang kuat untuk melakukannya. Dibutuhkan tujuan yang sama untuk mendorong setiap individu berani menanggung risiko dan membayar biaya dari politik yang penuh perdebatan. Alasan kuat yang menjadi dasar dari gerakan nelayan perempuan adalah pembangunan tersebut telah meminggirkan mereka, meminggirkan mereka dari sumber daya tempat mereka mencari sumber pendapatan, meminggirkan mereka dari hak-hak dan keadilan yang harusnya mereka dapatkan, meminggirkan mereka dari kesetaraan dan harus menanggung beban ganda akibat merosotnya ekonomi, meminggirkan mereka dari kesejahteraan, dan meminggirkan mereka dari kesehatan atas tubuhnya. Perempuan diletakkan pada posisi yang rentan, cenderung mendapatkan kekerasan secara struktural dan kultural ketika perlawanan terhadap reklamasi terjadi.

Tujuan bersama untuk mengubah keadaan dengan menghentikan proyek reklamasi menjadi sebuah gerakan dan aksi yang besar hingga menggugat ke ranah hukum. Pada tahun 2016, penolakan ini disuarakan oleh ratusan perempuan nelayan dan nelayan tradisional dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPRD DKI Jakarta dan dilanjutkan ke Istana Negara. Di depan gedung DPRD, peserta aksi menyampaikan tuntutan untuk menghentikan pembahasan Ranperda Zonasi Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil dan Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta. Pasalnya kedua Ranperda ini tak lain hanya untuk melegitimasi reklamasi di Teluk Jakarta. Pun pembahasan kedua Ranperda tersebut tidak partisipatif karena tidak melibatkan perempuan nelayan dan nelayan tradisional. Karenanya, jika kedua Ranperda tersebut disahkan, akan berdampak terhadap kehidupan perempuan nelayan dan nelayan tradisional. Aksi tersebut diikuti oleh ratusan nelayan perempuan (Liputan6, 2016).

- **Solidaritas Sosial**

Susan Herawati menjelaskan bahwa gerakan nelayan perempuan yang terbangun secara jaringan adalah melalui pendekatan holistik. Pendekatan ini menjadi cara dalam membangun keterikatan secara emosional melalui kegiatan-kegiatan yang di dalamnya setiap individu ikut berperan. Di sisi lain hal tersebut juga dapat membangun identitas kolektif yang membuat gerakan mereka bersama-sama untuk memperjuangkan kepentingannya. Solidaritas sosial yang terbangun adalah melakukan berbagai aksi demonstrasi terhadap pemerintah Provinsi Jakarta, orasi, dan gugatan pengadilan. Dalam membangun jaringan, gerakan perlawanan nelayan perempuan menolak reklamasi tidak hanya dalam ranah lokal tetapi membentuk jaringan secara nasional. Proyek reklamasi tidak hanya ditolak oleh nelayan perempuan di Jakarta tetapi juga di daerah lain seperti Lampung, Bali, Makassar, Palu dan Kendari. Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Puspa Dewi mengatakan bahwa gerakan tolak reklamasi sudah selayaknya menjadi gerakan nasional, bukan lokal. Sebab, dampak buruk reklamasi mengancam kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir, merusak lingkungan hingga mengganggu kedaulatan pangan (Safyra, 2016).

- **Interaksi yang Berkelanjutan**

Susan Herawati memaparkan, interaksi yang berkelanjutan dari gerakan perempuan dalam mempertahankan eksistensi dari perlawanannya adalah dengan melakukan pemetaan terhadap penguatan-penguatan lapisan nelayan terutama nelayan perempuan. Hal tersebut begitu penting karena dalam perjalanan sebuah gerakan, ada pelemahan-pelemahan baik dari individu maupun kelompok sehingga diperlukan penguatan melalui kegiatan-kegiatan kolektif yang bisa terus merawat perjuangan.

Menjalin kerjasama dengan organisasi masyarakat lain juga menjadi faktor yang penting, dengan catatan bahwa perlu adanya pemilihan kerjasama dengan organisasi masyarakat lain. Pertimbangan dari pemilihan kerjasama adalah adanya persamaan visi terkait apa yang diperjuangkan. Gerakan memerlukan koordinasi yang berjalan bersamaan, maka diperlukan tujuan yang sama untuk melakukan hal tersebut.

- **Dinamika Dalam Tubuh Gerakan Nelayan Perempuan dan Perlawanan Balik Pemilik Modal**

Della Porta menjelaskan bahwa suatu gerakan bisa mengalami kemerosotan bila identitas organisasi menjadi dominan. Artinya, gerakan sosial yang terdiri dari beberapa gerakan sosial tidak boleh ada yang merasa menjadi dominan karena akan berdampak pada menurunnya identitas secara kolektif dari sebuah gerakan. Dalam keterkaitannya dengan tubuh gerakan nelayan perempuan yang berkoalisi dengan gerakan-gerakan lain, kemudian bergabung ke dalam identitas kolektif yang dinamakan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, juga mengalami dinamika yang sangat tinggi dalam berjalannya gerakan tersebut. Susan Herawati menjelaskan bahwa dinamika yang terjadi yaitu gejolak-gejolak di organisasi dalam tubuh gerakan itu sendiri.

Pertama, beberapa aktor di dalam tubuh gerakan tersebut memanfaatkan untuk kepentingan politis pribadi, yaitu membawa dirinya masuk ke jenjang politik yang lebih tinggi. Ini memiliki efek hilangnya rasa kepercayaan untuk bergerak bersama di dalam tubuh dari gerakan nelayan itu sendiri. *Kedua*, koalisi yang besar membuat banyak strategi sulit untuk dilakukan pengawasan dan banyak aspek yang tidak terkoordinasi dengan baik. *Ketiga*, permainan politik adu domba yang saling membenturkan sesama masyarakat nelayan dengan tujuan untuk melemahkan gerakan nelayan dalam menentang dan menggugat pembangunan reklamasi; dan *keempat*, adanya politik identitas karena naiknya tensi isu agama di Jakarta.

Situasi politik lokal dalam gerakan nelayan perempuan juga ikut berpengaruh, terlebih ketika menuju Pemilihan Gubernur Jakarta 2018 yang pada saat itu terjadi peningkatan perpecahan akibat isu keagamaan dan polarisasi yang tinggi. Situasi polarisasi yang tinggi di tengah masyarakat Jakarta juga ikut memiliki efek domino ke masyarakat pesisir. Dinamika tersebut juga terjadi di tubuh gerakan yang menimbulkan polarisasi-polarisasi di tubuh gerakan.

Susan Herawati menjelaskan bahwa perlawanan dari kelompok nelayan mendapatkan respon perlawanan balik terhadap gerakan nelayan perempuan yang menentang dan menggugat pembangunan reklamasi. Perlawanan balik itu terjadi dengan melakukan cara apapun untuk menghentikan gerakan nelayan yang melawan. Pihak pemilik modal melakukan tindakan memberikan tawaran dan suap kepada nelayan untuk berhenti bersuara dan menggugat. Tindakan tersebut juga dibenarkan oleh Kwat, selaku Sekretaris dari Koalisi Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). Dia menjelaskan bahwa korupsi di mega proyek reklamasi terjadi di tingkat atas sampai tingkat bawah masyarakat (Randyka, 2016).

Gerakan nelayan juga tidak hanya menghadapi pihak pengembang (*developer*). Mereka juga menghadapi tindakan represif aparat kepolisian. Tindakan intimidasi sering ditujukan kepada nelayan. Tindakan yang berujung kriminalisasi, penuduhan komunis, dan kekerasan serta pengusiran kapal nelayan yang sedang melaut menjadi indikasi keberpihakan negara pada kepentingan pemilik modal. Terkait persoalan kriminalisasi ini, Pengadilan Negeri Jakarta Utara membebaskan dua nelayan yang menolak reklamasi dimana hakim membatalkan tuduhan Jaksa Penuntut Umum demi hukum (Andi, 2020).

Di situasi seperti ini, seharusnya negara melindungi masyarakatnya dan memastikan bahwa demokrasi dapat berjalan tanpa adanya rasa takut dari setiap individu. Intimidasi dan kriminalisasi menjadi pembunuhan demokrasi untuk menciptakan rasa takut dalam melakukan tindakan kritis menyampaikan aspirasi. Kelompok nelayan perempuan, semakin termarginalkan gerakannya ketika mereka berdiri berhadapan melawan negara dan pemilik modal.

SIMPULAN

Kapasitas gerakan perempuan dalam mengubah keadaan dan memperjuangkan hak-hak demokrasinya yang terpinggirkan menemukan berbagai kelemahan. Terdapat kemunduran demokrasi yang ditandai dengan memposisikan nelayan perempuan sebagai kelompok yang terpinggirkan. Muncul respon perlawanan sebagai masyarakat sipil melalui upaya konsolidasi gerakan sosial. Ini memberikan sebuah kesadaran bahwa ternyata masyarakat sipil selama ini mengalami pelemahan.

Gerakan demokrasi terpinggirkan, merupakan bentuk penguatan masyarakat sipil untuk mengakomodasi kepentingan nelayan perempuan. Namun, gerakan ini dihadapkan dengan banyaknya kelemahan-kelemahan di dalam tubuh gerakan itu sendiri. Ini menjadi sebuah realitas kondisi masyarakat sipil yang selama ini, dalam berjalannya negara, tidak memegang kontrol sebagaimana demokrasi itu diyakini. Sehingga, ketika sebuah kebijakan negara diputuskan atas dasar kepentingan *elite* dan pemilik modal, dan masyarakat sipil menolak karena dianggap tidak merepresentasikan keinginan masyarakat, gerakan perlawanan yang dibangun tidak cukup kuat untuk mengambil kontrol bernegara atau mengubah sebuah keputusan.

Gerakan nelayan perempuan sudah mengalami masalah sejak mulai konsolidasi hingga mereka bergerak. Dinamika politik yang terlalu tinggi dan pengalaman perempuan nelayan yang masih minim dalam sebuah gerakan menjadi sebuah jawaban bahwa kemunduran demokrasi dan pelemahan masyarakat sipil saling berhubungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amtai, Alaslan. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo. Hal. 21-77.
- Beetham, David. (2005). Democracy: A Beginner's Guide. London: Oneworld Publications. Hal. 36.
- B. Mitchell, D.H. Rahmi, B. Setiawan. (2003). Resource and environmental management. Gadjah Mada University Press.

- Della Porta, Donatella and Mario Diani. (2004). *Social Movement, an Introduction*, Blackwell Publishing, UK. Hal. 16-17.
- Della Porta, Donatella. (2022). *How Social Movements Can Save Democracy Democratic Innovations from Below*. Polity Press. Hal. 10.
- Della Porta, Donatella and Mario Diani. (2006). *Social Movement, an Introduction Second Edition*. Blackwell Publishing, UK. Hal. 18-22.
- F. Stewart. (2008). *Horizontal inequalities and conflict: Understanding group violence in multiethnic societies*. Hal. 3
- Koalisi Pakar Interdisiplin. (2017). *Makalah Kebijakan Selamatkan Teluk Jakarta*. Jakarta: Rujak Center for Urban Studies. Hal. 22-25.
- Krishna Listiyandra, Zuzy Anna, dan Yayat Dhahiyat. *Kontribusi Wanita Nelayan Dalam Upaya Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga Nelayan di Muara Angke Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara*. *Jurnal Perikanan Kelautan* Vol. VII No. 2. Hal. 89.
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- SP. Varma. (2010). *Teori Politik Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo. Hal. 215-216.
- S.P. Robbins. (1978). "Conflict management" and "conflict resolution" are not synonymous Terms. *California Management Review*. Hal. 2.
- Sampono, Nono. (2013). *Analisis Kebijakan Dalam Mengatasi Dampak Reklamasi Terhadap Kegiatan Perikanan Pantai di Teluk Jakarta*. Hal. 73.
- Sarni dan Masthuriyah. (2017). *Perempuan Nelayan Dalam Cengkeraman Pembangunan Reklamasi Teluk Kendari: Pengalaman Pendampingan*. Solidaritas Perempuan. Hal. 14.
- Stokke, Kristian. (2017). *Politics of Citizenship Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor dan PolGov Fisip UGM dan University of Oslo. Hal. 244.
- Tarrow, Sidney. (2011). *Power in Movement Social Movements and Contentious Politics* (3rd edition). Cambridge University Press. Hal. 9.

Website

- Ahmad. (2016). *Reklamasi Teluk Jakarta dan Suap Anggota DPRD*. Diakses pada 16 Agustus 2023, <https://www.liputan6.com/news/read/2473266/reklamasi-teluk-jakarta-dan-suap-anggota-dprd>
- Alfian dan Alfi. (2023). *Nelayan Kecil di Muara Angke: Rakyat Paling Alot Se-Jakarta Mencari Sejahtera Bersama*. ProjectMaltatuli. Diakses pada 10 Desember 2023, <https://projectmultatuli.org/nelayan-kecil-di-muara-angke-rakyat-paling-alot-se-jakarta-mencari-sejahtera-bersama/>
- Andi Saputra. (2020). *PN Jakut Bebaskan 2 Nelayan yang Tolak Reklamasi Jakarta*. Detiknews. Diakses pada 10 Desember 2023, <https://news.detik.com/berita/d-4884097/pn-jakut-bebaskan-2-nelayan-yang-tolak-reklamasi-jakarta>

- Arimbi. (2017). Data Kiara, 107.361 KK Nelayan Terusir akibat Reklamasi. Kompas. Diakses pada 10 Juli 2023, <https://properti.kompas.com/read/2017/01/16/214941121/data.kiara.107.361.kk.nelayan.terusir.akibat.reklamasi>
- Dawson, Jane 1996: *Eco-nationalism. Anti-nuclear Activism and National Identity in Russia, Lithuania, and Ukraine*. Durham/London: Duke University Press
- Deutsche Welle. (2021). Reklamasi Pesisir Selatan Penang Picu Polemik di Malaysia. Deutsche Welle. Diakses pada 6 Juli 2023, <https://www.dw.com/id/reklamasi-pesisir-selatan-penang-picu-polemik-di-malaysia/a-56714455>
- Ega Melindo. (2016). Liputan “Gerakan Perempuan Tolak Reklamasi Menuntut Dihentikannya Proyek Reklamasi yang Menindas dan Memiskinkan Perempuan”. Diakses pada 15 Agustus 2023, <https://www.solidaritasperempuan.org/liputan-gerakan-perempuan-tolak-reklamasi-menuntut-dihentikannya-proyek-reklamasi-yang-menindas-dan-memiskinkan-perempuan/>
- Fathiyah. (2018). Koalisi Anti Reklamasi Tuntut Pencabutan Izin Reklamasi Tanpa Kecuali. VOA Indonesia. Diakses pada 7 Desember 2023, <https://www.voaindonesia.com/a/koalisi-anti-reklamasi-tuntut-pencabutan-izin-reklamasi-tanpa-kecuali/4592085.html>
- Kiara. (2019). Kiara Desak Masyarakat ASEAN Melawan Proyek Reklamasi di Asia Tenggara. Kiara. Diakses pada 10 Juli 2023, <https://www.kiara.or.id/2019/09/13/kiara-desak-masyarakat-asean-melawan-proyek-reklamasi-di-asia-tenggara/>
- Kiara. (2017). Siaran Pers Bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta. Diakses pada 1 Agustus 2023. <https://www.kiara.or.id/2017/03/15/siaran-pers-bersama-koalisi-selamatkan-teluk-jakarta-2/>
- Kiara. (2015). Siaran Pers dan Deklarasi Bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta. Diakses pada 7 Desember 2023, <https://www.kiara.or.id/2015/12/02/siaran-pers-dan-deklarasi-bersama-koalisi-selamatkan-teluk-jakarta/>
- Liputan6. Ratusan Nelayan Tolak Reklamasi Pantai di Depan DPRD DKI. Liputan6dotcom. Diakses pada 12 Desember 2023, <https://www.liputan6.com/photo/read/2423012/ratusan-nelayan-tolak-reklamasi-pantai-di-depan-dprd-dki?page=1>
- Gama dan Serafica. (2020). *People Power dan Revolusi di Filipina 1986*. Kompas. Diakses pada 6 Desember 2023, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/02/153826269/people-power-dan-revolusi-di-filipina-1986>
- Mariejo and Thomson. (2023). FEATURE-Philippines fishermen balk at land reclamation projects. Reuters. Diakses pada 5 Juli 2023, <https://www.reuters.com/article/philippines-environment-fishing-idUKL8N35H0GH>
- Randyka Wijaya. (2016). KNTI: Suap Reklamasi Teluk Jakarta Mengalir Sampai Bawah. Diakses pada 15 Agustus 2023, https://kbr.id/04-2016/knti__suap_reklamasi_teluk_jakarta_mengalir_sampai_bawah/80082.html
- Safyra Primadhyta. (2016). Gerakan Nasional Perempuan Tolak Reklamasi. CNN Indonesia. Diakses pada 12 Desember 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160313150656-20-117018/gerakan-nasional-tolak-reklamasi-diserukan-kaum-perempuan>

Wawancara

Wawancara dengan Susan Herawati selaku Sekretaris Jenderal dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) yang tergabung pada Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ). Wawancara dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2023 pada pukul 17.00 melalui Google Meet.